

PELING-BANGGAI⁷--BEREBUT IBUKOTA ;

(Studi Tentang analisis aktor dan dinamika konflik Pemandangan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun-2006)

Oleh: Moh Rafli Abbas,. S.IP,.M.Arts⁸

Abstrak

Studi ini di rancang untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dibalik konflik berkepanjangan dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah. Di Kabupaten ini, ada dua kubu yang memperebutkan letak ibukota Kabupatennya. Ada yang menghendaki Kota Banggai dan ada yang menghendaki Kota Salakan. Masing-masing kubu punya alasannya sendiri, namun sama-sama tidak berterus terang dalam mengenai akar konflik yang mereka hadapi. Ketimpangan sepertinya luput dari perhatian kedua kubu. Tulisan ini lebih memfokuskan pada analisis aktor dan perkembangan tahapan-tahapan konflik dalam kerangka manajemen konflik perebutan dan pemindahan ibukota di era desentralisasi dan gencarnya spirit otonomisasi dan pemekaran daerah.

Kata Kunci: Analisis Aktor, Dinamika Konflik, Pemandangan Ibukota

⁷ Pulau Peleng dan Banggai adalah nama pulau yang terletak di wilayah Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan, provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Di pulau ini terdapat hewan khas, seperti Kuskus Beruang, Kuskus Banggai, dan Tarsius Pulau Paleng.

Kata "Peling" yang digunakan penulis hanyalah merujuk pada aksan pengucapan masyarakat lokal sehari-hari, sedangkan Kata "Banggai" selain merujuk pada tempat dapat pula merujuk pada nama salah satu suku yang mendiami di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kerajaan tertua di Indonesia.

⁸ Staf Pengajar Pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UBB (Universitas Bangka Belitung)

A. Pendahuluan

Fenomena perpindahan ibukota merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia khususnya pada level Propinsi dan Kabupaten. Perpindahan suatu ibukota diatur dalam hukum Administrasi Negara yang memandang bahwa sebuah ibukota (Propinsi, dan Kabupaten) adalah tempat dinamis yang tidak statis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan daerah sebagai ibukota yang siap dan layak di jadikan sebuah ibukota yang baru. Dimana suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan bagi Daerah-daerah sekitarnya harus wajib dan bersifat dinamis serta tanggap merespons perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan di wilayahnya tersebut, Namun sebaliknya, sifat kestatisan suatu ibukota justru menghambat perkembangan dan kemajuan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

Pemekaran daerah seharusnya memberi manfaat pada masyarakat, dan persoalan ibukota harusnya mendapat perhatian penuh dari Pemerintah daerah. Memikirkan kesejahteraan dalam kondisi konflik bukanlah perkara mudah, karena sebaik apapun konsep yang coba dijalankan oleh pemerintah daerah maka akan selalu dipersalahkan oleh pihak lain berdasarkan kepentingan tertentu. Celakanya ketika masing-masing kubu ini mempresepsikan secara negatif kebijakan pemerintah

tersebut, otomatis suhu konflik semakin meningkat. Dalam posisi ini, Pemerintah selalu bernasib sial dan masyarakat menjadi tumbal.

Banyak ahli menjelaskan gagasan pemekaran suatu daerah memiliki kecenderungan menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Pernyataan ini dapat dilacak di beberapa daerah yang menjemput pemekaran langsung dibarengi dengan menguatnya gejolak sosial atau konflik sosial. Salah satu yang ingin diteliti dalam tulisan ini adalah kabupaten Banggai kepulauan yang dimekarkan berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999. Namun sejumlah masalah hingga saat ini masih melilit khususnya polemik pemindahan ibukota kabupaten yang diatur dengan UU pemekarannya menimbulkan perseteruan sampai saat ini

Selain konflik horizontal yang kerap menghiasi ruang pemekaran dan pembentukan kabupaten baru, konflik yang tak kalah menarik adalah konflik vertikal. Bahkan konflik ini terjadi antara pemerintah dengan warganya, pemerintah dengan pemerintah atau bahkan pengusaha dengan masyarakat setempat (Kaman, dan Osman, 2000).⁹

Semakin besar dan meluasnya konflik yang terjadi maka upaya untuk

⁹ Ahmad H. Kasman dan Osman H (2000) Damai yang terkoyak; Catatan kelam dari Bumi Halmahera. Pustaka Podium.

memikirkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat menjadi dinomor duakan karena pemfokusan perhatian hanya tercurah kepada penyelesaian konflik tersebut. Memikirkan persoalan konflik bukan perkara mudah dan sederhana, karena memikirkan konflik dalam bentuk apapun berarti berpikir tentang tekanan. Satu sisi pemerintah dituntut memikirkan kelompok tertentu, sementara di pihak yang berbeda berusaha memikirkan keterwakilan kelompok lain sehingga dalam mencari titik temu penyelesaian hanya akan menaikkan tensi konflik yang terjadi. Penyajian ilustrasi di atas oleh penulis, menunjukkan suatu alasan mengapa setiap konflik yang terjadi khususnya konflik ibukota di Indonesia selalu menemui jalan buntu dan terasa sulit untuk menemukan titik temu penyelesaian sehingga yang tampak di permukaan hanyalah sebuah konflik berkepanjangan.

Dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia, hal yang samadialami oleh kabupaten Banggai Kepulauan yang hingga saat ini pun masih terjebak dalam polemik perebutan letak ibukota Kabupaten. Dan acapkali upaya penyelesaiannya mengalami jalan buntu. Akhirnya memunculkan rasa putus asa, serta ketidakpercayaan kepada pemerintah semakin besar hingga berujung terhambatnya proses pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Tentunya hal ini menguras tenaga dan pikiran, dalam posisi yang demikian masyarakatlah yang menjadi tumbal dari sebuah ke-egoisan yang dipertontonkan oleh para penentu kebijakan. Sungguh ironi memang sekaligus membuat penulis bertanya sampai kapan polemik ini dapat berakhir? Entahlah.

Konflik ini berawal dengan terpilihnya Drs. H. Irianto Malinggong, MM sebagai Bupati 2006-2011. Sejak lama dia memiliki keinginan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten, dan terpilihnya dia sebagai Bupati membuka lebar-lebar jalan untuk itu. Langkah kontroversi ini yang dinilai sebagai “bom waktu” konflik. Upayanya mendapat reaksi keras dari masyarakat, seperti dilansir oleh harian tempo.com edisi 12/1/2009.

Bupati Malinggong sebelumnya telah berkonsultasi dengan departemen dalam negeri tentang keinginannya setelah pelantikan dirinya sebagai Bupati. Setelah kepulangannya ke Banggai, masyarakat menyambutnya dengan kemurkaan. Ada kerumunan massa yang mengenakan ikat kepala merah, sebagian membawahi parang, dan bom ikan, seraya mengancam agar Bupati tidak menginjak kakinya di tanah Banggai. Melihat kondisi tersebut,

aparatus keamanan tidak bisa memberikan jaminan keamanan, terpaksa sang Bupati melanjutkan perjalanannya ke kota Salakan tempat asalnya dan menjalankan roda pemerintahan disana, sekaligus langkah awal untuk memuluskan niatnya.

Selanjutnya, langkah tersebut diikuti oleh DPRD, sementara itu Wakil Bupati (Drs. EHUD Salamah) dan Sekda (Drs. Zakaria Kamintang) masih tetap berkantor di Banggai. Entah rencana apa yang hendak disusun oleh dua pejabat yang tidak langsung mengindahkan perintah atasannya ataukah ini hanyalah strategi semata untuk menenangkan dan meredakan gejolak masyarakat? Masyarakat Banggai pun menyegel kantor Bupati. Langkah ini diambil karena Bupati yang baru terpilih ini tidak lagi berkantor di Banggai, melainkan di Salakan Ibukota baru yang dipaksakan kepindahannya sehingga proses pelayanan masyarakat menjadi lumpuh.

Bukan hanya itu saja, Warga kemudian memblokir pasokan kebutuhan pokok dari Pulau Banggai menuju Salakan. Tak dapat dipungkiri selama ini sebagian kehidupan warga Salakan masih bergantung pada Pulau Banggai khususnya kebutuhan pokok hal ini dikarenakan infrastruktur perekonomian yang ada di Banggai lebih maju dibandingkan dengan kota Salakan. Kekisruhan di atas berawal

dari adanya (dua) pasal yang saling kontradiktif dan bahkan cenderung multitafsir dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan berada di Kota Banggai. Namun, di pasal yang lain juga diatur: ibu kota dipindahkan ke Salakan lima tahun kemudian, berikut adalah bunyi pasal demi pasal dari Undang-undang tersebut yang menjadi duri dalam daging konflik pemekaran kabupaten ini:

Pasal 10 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai.

Pasal 11 Yang menyatakan bahwa: Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Banggai Kepulauan, Kedudukan Ibukota dipindahkan ke salakan.

Sebenarnya warga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai, pernah mengajukan gugatan “*judicial review*” keabsahan pasal yang mengatur pemindahan ibukota ke Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Februari 2008 yang telah didaftar pada registrasi Perkara Nomor 6/PUU-VI/2008. Untuk bisa memutuskan apakah pasal ini sah sesuai dengan konstitusi, namun hingga saat ini

semenjak kepindahannya, belum memperoleh solusi yang jelas.

Sebenarnya Pasal 10 dan Pasal 11 UU 51 Tahun 1999 telah ada setelah daerah ini lepas dari kabupaten induk. Hanya saja pada waktu itu yang menjadi Bupati adalah orang Banggai jadi persiapan untuk menjalankan UU tersebut tidak terealisasi dengan alasan bahwa kota Salakan dari segi kelayakan memang tidak memenuhi syarat sebagai Ibukota Kabupaten hal ini didukung oleh tim dari Balitbang. Tidak bisa di pungkiri memang kota Salakan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih bergantung dari kota Banggai yang notabene lebih maju dari segi perekonomian.

Namun Bupati yg terpilih tanpa memikirkan pertimbangan tersebut, yang secara kebetulan adalah orang Salakan ingin merealisasi kepindahan Ibukota Kabupaten sesuai dengan amanat UU 51 tersebut disinilah sebenarnya menjadi factor pemicu konflik. Dan hingga saat ini setelah kepindahan ibukota ke Salakan, walaupun kondisi konflik tidaklah memanas seperti di awal kepindahannya akan tetapi kondisi ini menurut penulis tidak bisa menjamin bahwa konflik perebutan ibukota ke dua daerah ini telah berakhir. Sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah pusat terhadap polemik yang di hadapi

masyarakat Banggai Kepulauan yang tak kunjung menemukan jalan penyelesaiannya. Fokus dari tulisan ini adalah untuk mencoba menjelaskan bagaimana analisis aktor dan dinamika konflik pemindahan ibukota banggai kepulauan sampai pada tahap-tahap resolusi konflik.

B. Kerangka Teoritik

Dalam masyarakat yang sedang mengalami konflik pada umumnya terdapat dua kelompok besar yang terlibat serta memiliki perspektif yang berbeda dalam meraih kepentingannya. Paul Collier (2003)¹⁰. Dalam penelitiannya yang disponsori oleh Bank Dunia di negara-negara yang sedang dilanda konflik yang terus-menerus berlangsung tanpa penyelesaian, seperti beberapa negara di Afrika dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia menyimpulkan bahwa konflik yang berlangsung terus-menerus, dan tidak menemukan solusinya yang tepat, melahirkan dua perspektif yaitu *greed* dan *grievance*. Menurutnya, konflik bisa diartikan dari dua pandangan perspektif tersebut. Dalam perspektif *greed*, konflik adalah sesuatu *event* yang menguntungkan karena adanya peluang melakukan eksploitasi masyarakat melalui propaganda

¹⁰ Collier Paul. 2003. *Breaking The Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washinton,DC. The World Bank,.

politik. Dalam situasi konflik itu segala cara yang dapat dilakukan untuk mendatangkan keuntungan, seperti halnya melakukan mobilisasi massa dan manipulasi fakta dalam mendiskreditkan lawan-lawan politiknya. Untuk itu, jika ingin *survive*, maka konflik harus diciptakan dan berupaya agar situasi masyarakat berlangsung terus-menerus dalam keadaan disharmonisasi.

Sementara dalam perspektif *grievance* konflik dipandang sebagai ketidakadilan karena dapat merugikan, terzalimi serta dapat mengancam eksistensinya. Mereka yang mengalami ketidakadilan dan rasa kekecewaan yang mendalam, akan melakukan tindakan *emergency* untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman, yaitu mau tidak mau harus melakukan perlawanan dengan segala strategi dan resiko. Bahkan menurut Klandermans dan Roggerband (2007)¹¹, *grievance* merupakan salah satu sumber potensi terjadinya akumulasi kekecewaan dan rasa frustrasi yang dapat berwujud dalam bentuk tindakan aksi kolektif yang irrasional. Bahkan dapat menjadi sebuah formulasi gerakan sosial untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, konflik, di samping tidak menguntungkan

(*disadvantaged*), akan menggiring ke arah marginalisasi dan diskriminatif dalam lingkungan politiknya (Gurr, 1998)¹². Hal ini bisa terjadi karena menyangkut ancaman eksistensi masa depan, sehingga mereka berupaya melakukan perlawanan dan mencari tindakan alternatif lain untuk merebut dan memperoleh kepentingan politiknya untuk hidup yang lebih layak.

Menurut Collier (2003)¹³, salah satu penyebab terjadinya konflik adalah adanya persaingan dalam memperebutkan *resources* yang langka atau sangat terbatas, seperti jabatan politik. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Oberg dan Strom (2008)¹⁴, bahwa *resources* bisa menjadi sumber konflik, jika terjadi ketimpangan dalam pendistribusiannya. Selanjutnya, Oberg dan Strom (2008)¹⁵ mengatakan bahwa *disputes over the control over resources, or the distribution of resources, are potensial reasons for civil conflict*. Sekalipun Collier (2003)¹⁶

¹²Gurr Robert Ted (ed). 1980. *Hand Book of Political Conflict: Theory and Research*. New York. TheFree Press, A Division of Macmillan Publishing Co.,Inc.

____Ted (ed). 1998. *Minorities at Risk:A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, Washinton DC. United State Institute of Peace Press.

¹³ibid

¹⁴Oberg Magnus and Strom Kaare,(ed). 2008. *Resources, Governance and Civil Conflict*. London.Routledge. and New York. Taylor & Francis Group (ecpr).

¹⁵ibid

¹⁶ibid

¹¹Bert Klandermans and Conny Roggeband. (ed). 2007. *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. New York. Springer Sciences + Business Media, LLC..

dan Hoeffler (2001)¹⁷, mempunyai perbedaan perspektif tentang konflik, mereka sepakat bahwa konflik terjadi untuk memperebutkan sumber-sumber politik dan ekonomi dengan tujuan agar kelompok dapat mempertahankan eksistensinya.

Selain itu perebutan lokasi sebuah ibukota bisa terjadi karena di dorong adanya kesenjangan pembangunan yang menjadi harapan masyarakat. Namun harapan akan hadirnya perubahan. Dengan pembangunan yang pesat, ternyata tidak berbading lurus dengan kebutuhan masyarakat. Melainkan lebih ditentukan oleh keinginan elit politik lokal. Sementara di ruang kekuasaan swasta, konflik sosial lebih banyak terjadi karena persaingan usaha (Dharmawan, 2008)¹⁸.

Merujuk pernyataan Myrdal (1986)¹⁹, ekspansi suatu wilayah tertentu mempunyai pengaruh yang merugikan serta menimbulkan ketidak seimbangan antara daerah. Dimana daerah yang mengalami pertumbuhan dan kemajuan akan menarik modal dari daerah-daerah

lain disekitarnya hingga investasi menjadi kurang dan modal akan mengalir ke pusat-pusat pertumbuhan. Demikian pula kegiatan perdagangan yang mengarah ke pusat pertumbuhan, dalam kondisi ini, sangat merugikan daerah dengan tingkat pertumbuhan rendah. Situasi ini tentunya dapat menimbulkan kecemburuan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminasi. Di era otonomi kesempatan untuk menuntut ketidakadilan seperti tuntutan pemekaran dan pemindahan lokasi ibukota terbuka lebar tak jarang dari tuntutan tersebut menimbulkan konflik horizontal yang menelan korban jiwa.

Di ruang kekuasaan Negara, konflik sosial berlangsung dalam praktek manajemen pemerintahan yang dinilai cenderung lalai dan bahkan gagal dalam prakteknya. Sebagai akibat salah olah-kewenangan pengendalian pembangunan yang berlangsung hirarki dan cenderung bersifat top-down, antara pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat. Konflik ini banyak menjelaskan soal konflik kewenangan yaitu tentang pengaturan pemerintahan desentralisasi sejak UU Nomor 22 Tahun 1999 sampai UU Nomor 32 Tahun 2004 berlangsung sebagai konsekuensi dari otonomi. (Azis Hasyimi, Arya Hadi Dharmawan, dan Bambang

¹⁷Hoeffler, Angke. 2001. "Greed and Grievance in Civil War". www.world-bank.org/research/papers/greedandgrievance.htm.

¹⁸Dharmawan A.H. Bahan kuliah Gerakan social dan dinamika masyarakat pedesaan Departemen komunikasi dan pengembangan masyarakat IPB.

¹⁹Myrdal, G. 1968, *gy Asian drama: An inquiry into the poverty of nations*. London. Allen lanen, 1968. *And Regional Development policy*.

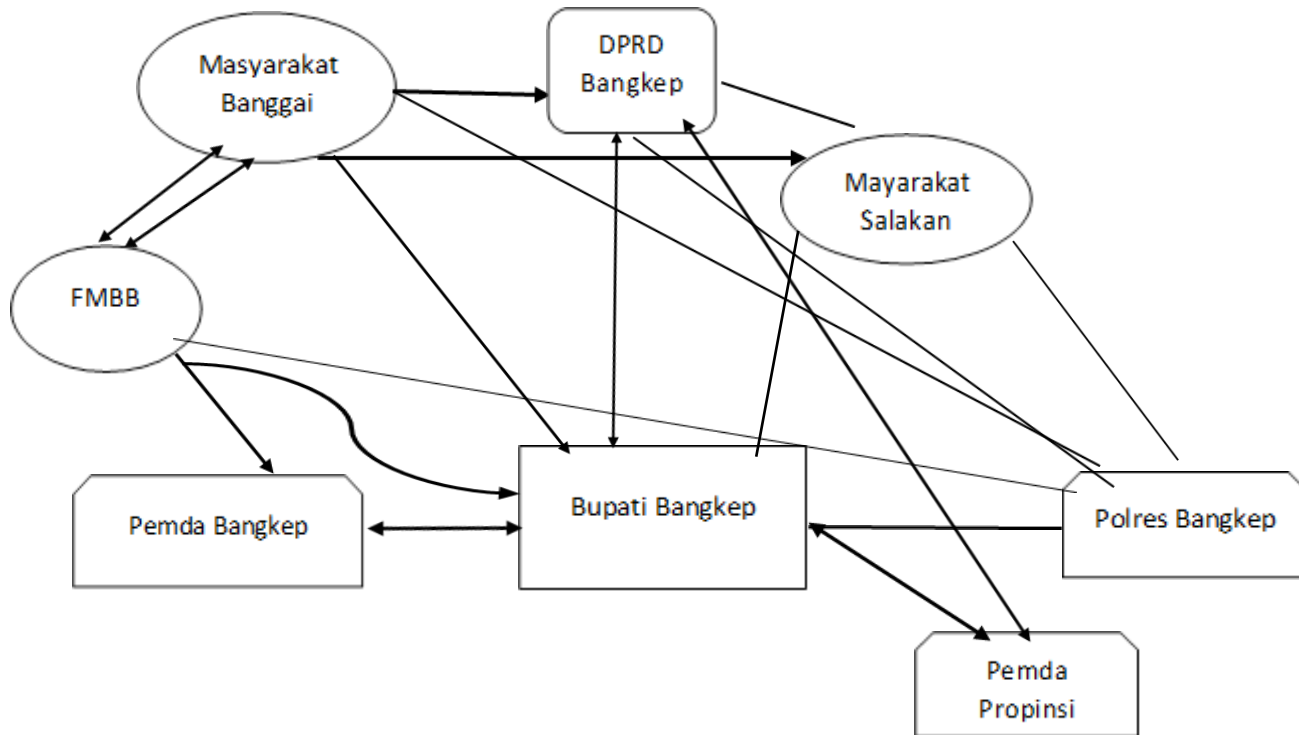
Juanda, 2010).²⁰

C. Pemetaan Konflik Pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan

Salah satu tujuan pemetaan konflik dihampir semua studi-studi konflik sebenarnya adalah untuk memahami situasi konflik dengan melihat hubungan diantara berbagai pihak yang berkonflik secara jelas terutama tentang hubungan dimana letak kekuasaan, keseimbangan diantara pihak yang bertikai, melihat hubungan relasi dan arah awal intervensi terjadinya konflik tersebut.

²⁰Analisis konflik perbutan wilayah di propinsi Maluku Utara; Studi kasus konflik perebutan wilayah antara kab. Halmahera Barat dan kabupaten Halmahera Utara tentang enam desa. (sodality: trans disiplin sosiologi, komunikasi dan ekologi manusia vol.4, No.1 2010/21.

Identifikasi Aktor-aktor yang Berkonflik



Dari uraian kasus konflik pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan di atas, maka dapat diidentifikasi para aktor yang terlibat dalam konflik tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pihak I : Masyarakat Banggai
2. Pihak II: Bupati Banggai Kepulauan (Pemda Kabupaten)
3. Pihak III: Forum Mondupulian Banggai bersatu (FMBB) / yang terdiri dari elemen warga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai
4. Pihak IV: DPRD Kab. Bangkep
5. Pihak V: Polres Banggai
6. Pihak VI: Pemerintah propinsi (sebagai aktor yang terlibat secara tidak langsung)
7. Isu Konfliknya : pemindahan letak

ibukota kabupaten banggai kepulauan dari kota Banggai ke kota Salakan.

Dari penjabaran peta konflik di atas maka dapat dilihat relasi masing-masing aktor dan masing-masing relasinya menunjukan adanya pola konflik yang berbeda-beda di setiap aktor yang ikut andil dalam eskalasi konflik pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan. Oleh karena itu penjeasan dari peta konflik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemicu awal konflik pemekaran Banggai kepulauan adalah antara Bupati terpilih Banggai kepulauan Drs. Irianto Malinggog dengan masyarakat banggai dan FMBB untuk menentang dan antipati serta

- menolak keberadaan Bupati Irianto yang sejak saat itu menjalankan roda pemerintahannya tidak lagi di Banggai melainkan di Salakan.
- Langkah untuk memindahkan ibukota tersebut walaupun mendapat perlawanan masyarakat Banggai dan FMBB, namun sang Bupati mendapat dukungan dari sebagian besar anggota DPRD Bangkep dan Pemerintah Propinsi.
 - FMBB mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat banggai karena merasa mewakili kepentingan masyarakat Banggai untuk tetap menentang kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten.
 - Konflik yang tercipta antara Polres Bangkep dengan FMBB diawali dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres terhadap oknum FMBB yang melakukan penyegelan dan pengusiran para PNS saat masih berkantor. Tindakan ini bagi polisi dianggap mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat.
 - Selain itu, konflik antara Polisi dan masyarakat Banggai terjadi disebabkan adanya 4 orang korban penembakan warga masyarakat Banggai yang meninggal dunia dalam tindakan penghalauan massa oleh aparat kepolisian terhadap aksi penyerangan masyarakat di Mapolsek Banggai. Akan tetapi menurut masyarakat, hal tersebut adalah faktor salah tembak Polisi dan oknum Polisi yang melakukan penembakan harus diadili sesuai hukum yang berlaku.
 - Sementara itu, Polres Banggai mempunyai hubungan yang baik dengan Pemda bangkep itu sendiri hubungan baik tersebut dibuktikan dengan kehadiran Kapolres Bangkep M. Nazli dalam mengikuti dan menandatangani risalah rapat untuk pemindahan ibukota di ruang rapat Depdan Otsus Departemen dalam negeri di Jakarta

D. Tahapan Konflik di Kabupaten Banggai Kepulauan



1. Fase Pra Konflik

Tahapan ini merupakan tahap dimana terdapat ketidaksesuaian antara sasaran dan tujuan yang dialami antara masyarakat Banggai dan masyarakat Salakan sehingga timbul konflik. Namun konflik tersebut tersembunyi dari pandangan Pemerintah dan kedua belah pihak, dan saat itu pula terjadi ketegangan hubungan antara masyarakat Banggai dan Salakan. Karena saat itu mereka saling menghindari kontak antara satu dengan yang lain. Pada tahap ini juga terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami UU No. 51 tahun 1999. Dalam UU tersebut ada 2 pasal yang saling kontradiktif yaitu pasal 10 ayat (3) tertulis ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di kota Banggai, sedangkan pada pasal 11 tertera bahwa selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun akan di pindahkan ke Salakan. Namun masyarakat Banggai menganggap bahwa ibukota Kabupaten Bangkep, masih tetap ada di Banggai sesuai dengan amanat pasal 10. Sedangkan masyarakat peling (Salakan) menganggap ibukota Bangkep harus sudah pindah sesuai yang tertera pada pasal (11) tersebut.

2. Tahap Konfrontasi

Pada tahap ini konflik pemindahan ibukota Bangkep semakin terbuka. Pada fase ini, salah satu pihak mulai melakukan

aksi demonstrasi. Dan masing-masing pihak mulai mengumpulkan sumber daya dan kekuatan serta mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara Pemda khususnya Bupati dengan masyarakat Banggai menjadi sangat tegang diantara pendukung di masing-masing pihak yang berkonflik.

Pada tahap konfrontasi ini ditandai dengan adanya terbentuknya aliansi di masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang bergabung membentuk wadah dengan nama Forum Mondopulian Banggai Bersatu (FMBB). Dan selanjutnya FMBB bersama massanya kerap melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan kantor DPRD. FMBB juga melakukan sweeping terhadap kendaraan Dinas yang coba disebrangkan ke Salakan.

Puncak dari tahap konfrontasi ini adalah aksi penyegelan kantor Bupati, kantor DPRD, dan kantor-kantor Dinas milik Pemda Bangkep. Oleh FMBB langkah yang ditempuh adalah sebagai bentuk protes terhadap Pemda Bangkep yang melaksanakan proses pemindahan Dinas-dinas Operasional secara bertahap. Dan sebagai pemicu dalam tahapan ini adalah pelaksanaan rapat sidang penentuan anggaran APBD oleh DPRD Bangkep yang dilaksanakan di kota Salakan

sehingga membuat masyarakat Banggai meyakini bahwa ibukota Kabupaten telah pindah ke Salakan. Dan pada tahapan ini pula Polres Bangkep berupaya berperan aktif dalam penanganan dan pencegahan konflik agar tidak berkembang menjadi lebih besar yang mengarah pada tindak kekerasan. Antara Pemda Bangkep dan masyarakat banggai pada situasi ini tidak jarang masih terjadi konflik-konflik kecil yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan percikan api konflik episode selanjutnya.

3. Krisis konflik yang terjadi

konflik yang terjadi di Kabupaten Bangkep sebenarnya belum memasuki tahapan krisis seperti konsep krisis dalam teori-teori konflik, karena konflik yang berlangsung di Banggai Kepulauan, belum terjadi ketegangan dan kekerasan yang hebat diantara pihak Pemda maupun dari masyarakat Banggai yang belum menunjukkan pertikaian yang sengit hingga berakibat jatuhnya korban jiwa diantara ke-dua belah pihak yang bertikai. Empat korban jiwa masyarakat Banggai jatuh justru lebih disebabkan oleh tindakan represif oleh aparat Kepolisian sehingga terjadi penembakan yang tidak di inginkan oleh semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam konflik pemindahan ibukota Banggai kepulauan.

4. Akibat konflik pemindahan ibukota

Pada tahapan ini salah satu pihak mungkin mengalahkan pihak lain atau malah kedua pihak tersebut melakukan gencatan senjata. Dan satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju melakukan negoisasi dengan atau tanpa bantuan pihak ke-tiga. Satu pihak yang mempunyai otoritas lebih tinggi atau pihak lainnya yang lebih berkuasa memaksa kedua pihak yang berkonflik untuk menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan pada tahap ini agak menurun. Dan dalam keadaan ini memungkinkan adanya terciptanya kesempatan untuk menuju kearah penyelesaian pertikaian.

5. Fase Paskah konflik dan proses Resolusi

Pada tahapan ini tentunya masih tetap dibutuhkan peranan Polres Bangkep dalam upaya penanganan konflik, dengan melakukan proses mediasi yaitu dengan menjadi salah satu pihak ke-tiga untuk menyelesaikan permasalahan kedudukan Ibukota. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertemuan yang dilakukan dan di prakarsai oleh Kapolres Bangkep dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian konflik dengan cara membangun komunikasi yang

putus antara masyarakat Banggai dengan Bupati Bangkep. Mapolres Bangkep mengundang para tokoh masyarakat untuk berdialog bersama guna mendapatkan kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Dari pertemuan-pertemuan yang digelar tidak menemukan kesepakatan bersama, dan masing-masing pihak mempertahankan tujuannya atau kepentingannya masing-masing.

Upaya resolusi konflik selanjutnya dapat ditemui dengan adanya pertemuan yang di prakarsai oleh Gubernur Sulteng untuk mempertemukan Bupati Bangkep dengan tokoh-tokoh masyarakat Bangkep termasuk FMBB dengan tujuan untuk mengakhiri konflik kedudukan ibukota kabupaten pertemuan tersebut dicapai dengan tujuh kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah kubu yang berkonflik. Pada tahap ini situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi. Kekerasan dan ketegangan berkurang, dan hubungan kedua belah pihak mengarah menjadi normal kembali diantara pihak-pihak yang bertikai. Akan tetapi jika persoalan dan masalah yang timbul karena tujuan para pihak yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, maka pada tahap ini sering kali kembali menjadi situasi pra konflik.

Atas dasar hasil kesepakatan dari

berbagai pihak yang berkonflik maka dibentuklah panitia pemekaran Kabupaten Banggai Laut yang difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah Banggai kepulauan, guna menyiapkan pengusulan pemekaran kabupaten banggai Laut untuk bisa masuk dalam agenda rapat anggota DPR-RI. Sampai saat ini pengusulan pemekaran Kabupaten Banggai Laut telah masuk dalam agenda rapat anggota DPR-RI dan sedang menunggu hasil putusan penetapannya. Wacana pemekaran Banggai laut hingga saat ini masih menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat dan serasa sebagai obat penawar konflik bagi kedua daerah yang bertikai. Namun bagi penulis apakah isu pemekaran ini merupakan solusi yang terbaik bagi ke-dua daerah tersebut? Entahlah..esensinya pemekaran seharusnya mampu membawah perubahan yang mengarah ke- masing-masing kubu semoga.

E. Kesimpulan

Ketersediaan banyaknya referensi buku tentang studi pemekaran, maupun hasil-hasil penelitian berupa makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan desertasi yang membahas tentang konflik pemekaran bukanlah hal yang baru, namun Titik kebutaan kajian studi-studi pemekaran

selama ini maupun konflik-konflik sosial lain di Indonesia, lebih menitik beratkan pada isu primordial yang berbasis agama dan etnis dan cenderung skeptis pada elit dan sudut pandangnya patologis kerap menjadi penjelasan dominan bagi serangkaian konflik yang terjadi selama proses pemekaran dan pemindahan ibu kota. Dan bagi penulis ada sejumlah persoalan struktural yang selama ini terlupakan dalam membedah dan menganalisis setiap konflik-konflik pemekaran di Indonesia. Padahal studi ini sangat penting karena di era otonomi sekarang ini, dengan begitu menjamurnya tuntutan dari daerah-daerah untuk bisa dimekarkan semakin tak terkendali sehingga memaksa Pemerintah mengeluarkan keputusan Moratorium pemekaran daerah.

Selain itu pula tulisan ini diharapkan memberi pelajaran berharga bagi kita semua terutama pemerintah pusat yaitu sebagai bahan evaluasi khususnya Presiden, Kemenendagri, dan DPR Untuk lebih selektif lagi dan konsisten dalam menjalankan agenda moratorium pemekaran daerah yang sedang bergulir. Sebab banyak daerah-daerah otonom baru pasca pemekaran, masih banyak yang mengalami masalah dalam konflik pemekaran yang tak kunjung terselesaikan. Terutama mengenai masalah-masalah

internal seperti perebutan letak ibukota, ataupun masalah-masalah perebutan *resource* yang dimiliki. Tak jarang dalam menempuh penyelesaiannya menjadi konflik bersifat terbuka yang cenderung anarkis dan menelan korban jiwa.

F. Sumber Acuan:

Ahmad H. Kasman dan Osman H (2000) Damai yang terkoyak; Catatan kelam dari Bumi Halmahera. Pustaka Podium.

Analisis konflik perbutan wilayah di propinsi Maluku Utara; Studi kasus konflik perebutan wilayah antara kab. Halmahera Barat dan kabupaten Halmahera Utara tentang enam desa. (sodality: trans disiplin sosiologi, komunikasi dan ekologi manusia vol.4, No.1 2010/21.

Bert Klandermans and Conny Roggeband. (ed). 2007. *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. New York. Springer Sciences + Business Media, LLC..

Collier Paul. 2003. *Breaking The Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washinton,DC. The World Bank,.

Dharmawan A.H. Bahan kuliah Gerakan social dan dinamika masyarakat

pedesaan Departemen komunikasi dan pengembangan masyarakat IPB.

Gurr Robert Ted (ed). 1980. *Hand Book of Political Conflict: Theory and Research*. New York. TheFree Press, A Division of Macmillan Publishing Co.,Inc.

_____Ted (ed). 1998. *Minorities at Risk:A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, Washinton DC. United State Institute of Peace Press.

Hoeffler, Angke. 2001. "Greed and Grievance in Civil War". www.world-bank.org/research/papers/greedandgrievance.htm.

Myrdal,G. 1968, gy Asian drama: An inquiry into the poverty of nations.London.Allen lanen,1968. And Regional Development policy.

Oberg Magnus and Strom Kaare,(ed). 2008. *Resources, Governance and Civil Conflict*. London.Routledge. and New York. Taylor & Francis Group (ecpr).